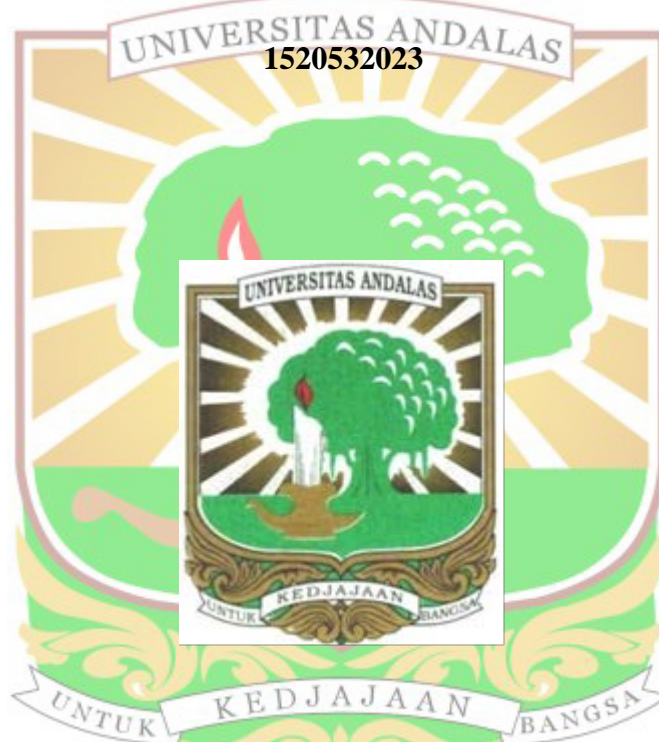


**EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

TESIS

DIANS AGUNG SATRIA



Pembimbing 1: Dr. Yurniwati, S.E., M.Si., Ak., CA.
Pembimbing 2: Dr. Suhairi, S.E., M.Si., Ak.

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS**

2017

**EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

DIANS AGUNG SATRIA

1520532023



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS**

2017

EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Oleh: DIANS AGUNG SATRIA (1520532023)

(Di bawah bimbingan : Dr. Yurniwati, S.E., M.Si., Ak., CA. dan
Dr. Suhairi, S.E., M.Si., Ak.)

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang evaluasi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Pariaman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016, yang meliputi pembukuan aset tetap, inventarisasi aset tetap, pelaporan aset tetap dan kelengkapan pengisian dokumen aset tetap. Penelitian ini juga menganalisis penatausahaan harga perolehan dan tahun perolehan aset tetap pada kartu inventaris barang dan kendala-kendala dalam penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Pariaman telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dari hasil evaluasi diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di pemerintah Kota Pariaman adalah sebesar 75,74% yang terdiri dari prosedur pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap sebesar 82,30% dan kelengkapan pengisian dokumen sebesar 69,12%. Dalam penelitian ini juga dilakukan evaluasi tambahan yaitu kelengkapan item tahun perolehan di kartu inventaris barang sebesar 62,19% dan kelengkapan harga perolehan sebesar 100%.

Kendala yang ditemui Pemerintah Kota Pariaman dalam penatausahaan aset tetap yaitu minimnya fasilitas untuk peningkatan kompetensi pengurus barang, keterbatasan data pendukung aset tetap, kurangnya pemberian kompensasi kepada pengurus barang SKPD dan belum maksimalnya koordinasi dan komitmen pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap.

Kata Kunci: Penatausahaan Aset Tetap, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016

EVALUATION OF FIXED ASSETS ADMINISTRATION IN MUNICIPALITY OF PARIAMAN

Oleh: DIANS AGUNG SATRIA (1520532023)

(Supervised by : Dr. Yurniwati, S.E., M.Si., Ak., CA. and
Dr. Suhairi, S.E., M.Si., Ak.)

ABSTRACT

This research evaluate the compatibility of fixed assets administration in Municipality of Pariaman with the Regulation of Ministry of Home Affair no. 19 year 2016, which consists of fixed assets bookkeeping, fixed asset inventory, fixed asset reporting, and completeness of fixed assets document filling. This research is also analyze the administration of acquisition price and acquisition year of fixed asset in inventory cards. Moreover, it also analyze obstacles on fixed asset administration in Municipality of Pariaman. It is a case study research using descriptive analysis of data. Data was collected by interview, observation, and documentation.

The study shows that fixed assets administration in Municipality of Pariaman has done well and compatible with Regulation of Ministry of Home Affair no. 19 year 2016 on Guidelines on Management of Regional Property. The evaluation results show that average fits of assets administration is 75.74%. It is including the average fit of bookkeeping, inventory, and reporting at 82.30% and the completeness of document filling at 69.12%. This study also include additional evaluation on completeness of acquisition years in inventory cards (62.19%) and completeness of acquisition price in inventory cards (100%).

The obstacles found on fixed asset administration are the lack of facilities to increase the competence of items managers, shortage of supporting data on fixed assets, Lack of compensation to SKPD committees and the minimum coordination and commitment of the those involved in the administration of fixed assets.

Keywords: Fixed asset administration, Regulation of Ministry of Home Affair no. 19 year 2016